ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN (2011-2015)

SKRIPSI

Oleh :

Nama	: Hanif Setiawan
Nomor Mahasiswa	: 12313044
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

diajukan oleh:

Nama	: Hanif Setiawan
Nomor Mahasiswa	: 12313044
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis



Hanif Setiawan

PENGESAHAN

Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

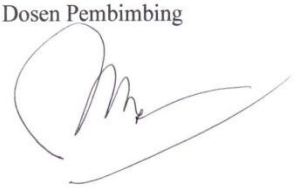
Oleh :

Nama	: Hanif Setiawan
Nomor Mahasiswa	: 12313044
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Telah di setujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Jaka Sriyana SE.,M.Si.Ph.D

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015

Disusun Oleh : **HANIF SETIAWAN**

Nomor Mahasiswa : **12313044**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 22 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Suharto, SE., M.Si. .....

Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, Karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya, tanpa berusaha.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan umat islam. Seiring dengan rasa syukur atas kenikmatan dan kesuksesan, karya kecil ini aku persembahkan kepada:

1. Ayah ku tercinta, H.Zainur Rohman SH
2. Adek ku Anisa Amalia
3. Semua teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia
4. Almamater ku, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memeberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul ***"Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015".***

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Jaka Sriyana SE.,M.Si.Ph.D selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso SE.,MIDEc. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Imu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang sudah di berikan kepada saya,
6. Orangtuaku tercinta, H.Zainur Rohman SH yang tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya.
7. Sahabat seperjuangan ku Cahya Andriawan, M.Fegy Sagita, Samijan Agus P, Munawir Abbas, Linda F, Reni Susanti, Citra Wahyu P, Syahida Syita serta semua teman Ilmu Ekonomi angkatan 2012.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta saran yang bersifat membangun dan lebih baik di masa depan.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis,

Hanif Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul..... ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan Skripsi iv

Halaman Motto v

Halaman Persembahan vi

Halaman Kata Pengantar vii

Halaman Daftar Isi viii

Halaman Daftar Tabel xii

Halaman Abstrak xiii

BAB 1 PENDAHULUAN .....…1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah.....9

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 10

1.5. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....…12

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Landasan Teori.....15

2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi 15

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 16

2.2.3 Teori Ketimpangan Pendapatan antar Dartah.....19

2.2.4 Faktor-Faktor Ketimpangan 20

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia 25
2.2.6 Klasifikasi Industri di Indonesia.....26
2.2.7 Pariwisata Berkelanjutan 27
2.3 Kerangka Pemikiran.....28
2.4 Hipotesis.....29
BAB III METODE PENELITIAN .....…30
3.1 Jenis dan Sumber Data.....30
3.2 Definisi Operasional Variabel.....30
3.2.1 Variabel Dependen 30
3.2.1.1 Ketimpangan Regional 30
3.2.2 Variabel Independen.....31
3.2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 31
3.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 31
3.2.2.3 Industri.....31
3.2.2.4 Pariwisata.....31
3.3 Definisi Operasional Variabel.....32
3.3.1 Analisis Ketimpangan dengan metode Indeks Entropi Theil 32
3.3.2 Analisis Regresi Data Panel 33
3.3.2.1 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data.....34
3.3.3 Pengujian Hipotesis 37
3.3.3.1 Uji T.....37
3.3.3.2 Uji F.....37
3.3.3.3 Koefisien Determinasi 38

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....…39

4.1 Analisis Deskripsi Data.....39

4.2 Hasil Uji Model Regresi Panel.....39

4.2.1 Pemilihan model dalam pengolahan data.....39

4.2.1.1 Uji Signifikansi F.....40

4.2.1.2 Uji Hausman.....41

4.2.1.3 Estimasi *Fixed Effect*.....42

4.2.2 Pengujian Hipotesis 44

4.2.2.1 Uji T.....44

4.2.2.2 Uji F.....45

4.2.2.3 Koefisien Determinasi.....46

4.3 Pembahasan dan Analisis.....46

4.3.1 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pembangunan 46

4.3.1 Analisis Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan 47

4.3.1 Analisis Pengaruh Industri terhadap Ketimpangan Pembangunan 48

4.3.1 Analisis Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pembangunan 49

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....…50

5.1 Kesimpulan.....50

4.2 Implikasi.....51

DAFTAR PUSTAKA.....52

LAMPIRAN.....54

DAFTAR TABEL

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2011-2015 4

1.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 5

1.3. Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.....8

2.1. Kerangka Pemikiran 28

3.1. Penjelasan ringkas pemilihan model Data Panel 28

4.1. Hasil Signifikansi F.....40

4.2. Hasil Uji Hausman.....41

4.3. Hasil Estimasi Fixed Effect.....42

4.4. Cross Effect.....43

4.5. Periode Effectt.....44

4.6. Hasil Uji T 44

ABSTRAKSI

Ketimpangan antar wilayah merupakan permasalahan klasik yang harus dihadapi secara serius dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan metode regresi data panel untuk membuktikan hipotesis ketimpangan antar wilayah, serta menganalisis variabel PDRB, IPM, Industri dan Pariwisata terhadap Ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 5 tahun, mulai dari tahun 2011 – 2015 yang di peroleh dari media informasi internet Badan Pusat Statistik, Metode analisis data panel yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan uji Signifikansi F, Hausman test dan Uji T, Uji F dan R2

Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Ketimpangan, IPM berpengaruh Negatif terhadap Ketimpangan, Industri tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan, dan Pariwisata berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan

Kata Kunci : Ketimpangan, PDRB, IPM, Industri, Pariwisata

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan

pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Di mana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah yang makmur. Prof. Simon Kuznets mengemukakan enam karakter atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bias ditemui dihampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut (Todaro, 2004):

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi.

3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Ada semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula, sebaliknya jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. (Kuncoro, 2006)

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
DKI JAKARTA	6.73	6.53	6.07	5.91	5.88
JAWA BARAT	6.5	6.5	6.33	5.09	5.03
JAWA TENGAH	**5.3**	**5.34**	**5.11**	**5.28**	**5.44**
DI YOGYAKARTA	5.21	5.37	5.47	5.16	4.94
JAWA TIMUR	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44
BANTEN	7.03	6.83	6.67	5.47	5.37

(Badan Pusat Statistk, 2015)

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi provinsi atau regional seluruh wilayah Indonesia. Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, dari enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2015, ada tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi : provinsi DKI Jakarta 5.88 persen provinsi Jawa Tengah 5.44 persen dan provinsi Jawa Timu 5.44 persen. Sedangkan propinsi yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah ketiga provinsi tersebut adalah provinsi Jawa Barat sebesar 5.03 persen, provinsi DI Yogyakarta sebesar 4.94 persen, dan provinsi Banten sebesar 5.37 persen.

Keberhasilan proses pembangunan dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi serta semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi mayoritas pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektoral

terutama selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah yang relatif lebih maju, sementara untuk daerah yang kurang berkembang tidak menjadi wilayah kegiatan ekonomi.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
01. Kab. Cilacap	75,099,090	78,156,819	79,702,238	81,369,806	83,775,741
02. Kab. Banyumas	23,016,943	24,538,596	25,982,158	27,772,165	29,098,390
03. Kab. Purbalingga	10,858,632	11,474,221	12,138,445	12,819,160	13,554,297
04. Kab. Banjarnegara	9,439,359	9,952,404	10,473,363	11,024,783	11,583,436
05. Kab. Kebumen	12,311,422	13,068,986	13,707,057	14,344,827	15,176,442
06. Kab. Purworejo	8,513,491	8,993,814	9,406,243	9,886,890	10,344,988
07. Kab. Wonosobo	9,005,926	9,489,550	9,935,905	10,457,818	10,892,939
08. Kab. Magelang	14,363,231	15,323,039	16,071,143	17,083,609	17,915,809
09. Kab. Boyolali	13,721,701	14,592,026	15,369,974	16,265,749	17,085,662
10. Kab. Klaten	17,002,050	18,071,351	19,102,403	20,299,991	21,391,718
11. Kab. Sukoharjo	16,357,222	17,319,639	18,342,247	19,403,139	20,423,512
12. Kab. Wonogiri	13,310,571	13,786,711	14,605,088	15,305,298	16,109,708
13. Kab. Karanganyar	16,393,789	17,205,064	18,189,077	19,224,636	20,208,968
14. Kab. Sragen	15,832,558	16,870,231	17,902,105	19,102,982	20,170,943
15. Kab. Grobogan	12,766,022	13,172,712	13,842,047	14,471,229	15,053,762
16. Kab. Blora	10,149,080	10,597,723	11,116,866	11,712,505	12,227,201
17. Kab. Rembang	8,373,547	8,808,303	9,277,163	9,778,950	10,282,184
18. Kab. Pati	18,782,547	19,893,325	21,072,329	22,314,754	23,327,059
19. Kab. Kudus	52,933,496	55,175,795	57,440,811	60,042,550	62,603,070
20. Kab. Jepara	13,347,321	14,073,724	14,769,977	15,634,313	16,351,578
21. Kab. Demak	11,647,736	12,275,703	12,823,227	13,499,226	14,075,692
22. Kab. Semarang	21,572,137	22,925,457	24,306,718	25,976,021	27,534,877
23. Kab. Temanggung	9,710,199	10,301,570	10,740,983	11,400,498	11,987,832
24. Kab. Kendal	18,798,278	20,032,434	21,075,717	22,324,824	23,463,053
25. Kab. Batang	9,447,328	10,025,045	10,488,457	11,101,127	11,690,342
26. Kab. Pekalongan	10,254,315	10,834,201	11,354,850	12,034,806	12,627,134
27. Kab. Pemalang	11,282,196	11,847,199	12,477,235	13,166,859	13,893,576
28. Kab. Tegal	15,106,510	16,071,820	16,912,250	18,053,605	18,955,756
29. Kab. Brebes	20,158,108	21,498,422	22,482,263	23,823,557	25,091,713
30. Kota Magelang	4,010,718	4,255,662	4,484,268	4,755,269	4,987,376
31. Kota Surakarta	21,469,551	22,848,439	24,123,782	25,612,681	26,955,056
32. Kota Salatiga	5,845,476	6,230,219	6,574,907	6,986,910	7,322,580
33. Kota Semarang	80,824,100	86,142,967	91,282,029	97,340,979	102,501,386
34. Kota Pekalongan	4,624,260	4,878,332	5,151,814	5,456,187	5,755,282
35. Kota Tegal	6,895,713	7,341,540	7,650,480	8,067,376	8,473,076

(BPS dalam angka, 2015)

Tabel diatas menunjukan penyumbang PDRB terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Caska & Riadi, 2007). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Perubahan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDB (Produk Domestik Bruto) atas harga konstan secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diukur dan diberi bobot yan bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Usaha pemerintah pusat dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam membangun daerahanya sendiri telah didukung oleh adanya undang-undang pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan UU RI No.33 tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerahdan pemerintah pusat, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan yaitu daerah otonom yang disertai dengan kemandirian pengelolahan daerahnya (UU no.33:2004). Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batastertentu memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

asprirasi masyarakat. Tolak ukur untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan adalah dengan melihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin minimnya ketimpangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Ketimpangan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap.

Di sisi lain gelombang pencari kerja juga mengalir mengejar kesempatan ke kota-kota besar, ke daerah-daerah yang kaya potensi. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota-kota besar. Oleh karena di kota-kota besar tersebut relatif banyak golongan ekonomi lemah dari penduduk asli ataupun dari daerah-daerah lain dapat mengakibatkan saling berebut tempat dan peluang antar kelompok daerah asal (Munir, 2003).

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

Indeks Pembangunan Manusia					
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	64.73	65.72	66.8	67.25	67.77
Kabupaten Banyumas	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89
Kabupaten Purbalingga	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03
Kabupaten Banjarnegara	61.58	62.29	62.84	63.15	64.73
Kabupaten Kebumen	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87
Kabupaten Purworejo	69.11	69.4	69.77	70.12	70.37
Kabupaten Wonosobo	63.07	64.18	64.57	65.2	65.7
Kabupaten Magelang	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13
Kabupaten Boyolali	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74
Kabupaten Klaten	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81
Kabupaten Sukoharjo	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53
Kabupaten Wonogiri	64.75	65.75	66.4	66.77	67.76
Kabupaten Karanganyar	71	72.26	73.33	73.89	74.26
Kabupaten Sragen	68.12	68.91	69.95	70.52	71.1
Kabupaten Grobogan	65.41	66.39	67.43	67.77	68.05
Kabupaten Blora	63.88	64.7	65.37	65.84	66.22
Kabupaten Rembang	65.36	66.03	66.84	67.4	68.18
Kabupaten Pati	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51
Kabupaten Kudus	69.89	70.57	71.58	72	72.72
Kabupaten Jepara	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02
Kabupaten Demak	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75
Kabupaten Semarang	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89
Kabupaten Temanggung	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07
Kabupaten Kendal	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57
Kabupaten Batang	62.59	63.09	63.6	64.07	65.46
Kabupaten Pekalongan	64.72	65.33	66.26	66.98	67.4
Kabupaten Pemalang	59.66	60.78	61.81	62.35	63.7
Kabupaten Tegal	61.97	62.67	63.5	64.1	65.04
Kabupaten Brebes	60.51	60.92	61.87	62.55	63.18
Kota Magelang	74.47	75	75.29	75.79	76.39
Kota Surakarta	78	78.44	78.89	79.34	80.14
Kota Salatiga	78.76	79.1	79.37	79.98	80.96
Kota Semarang	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23
Kota Pekalongan	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69
Kota Tegal	70.03	70.68	71.44	72.2	72.96

(BPS dalam angka Jawa Tengah, 2015)

Dapat dilihat bahwa tingkat IPM yang tinggi terdapat di Kota Semarang, Salatiga dan Surakarta dengan nilai IPM diatas 80, sedangkan untuk daerah dengan tingkat IPM menengah yaitu Kota Magelang 76.39, Kabupaten Sukoharjo 74.53, Kabupaten Karanganyar 74.26, Tingkat IPM tinggi cenderung terdapat di wilayah perkotaan, dengan demikian ketimpangan IPM antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini cukup tinggi. Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan factor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, diduga terjadi ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dengan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **"Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015".**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?

2. Apakah IPM berpengaruh terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
3. Apakah Industri berpengaruh terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
4. Apakah Pariwisata berpengaruh terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh Industri terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Pariwisata terhadap ketimpangan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ;

1. Bagi Penulis Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi.

2. Bagi Pemerintah Hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan informasi mengenai tingkat ketimpangan ekonomi, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasannya, tujuan dan manfaat kegiatan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini, tinjauan ustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini berisi tentang variable penelitian dan deskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode mengumpulkan data, serta metode analisis**.**

BAB IV : SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab ini dijabarkan alur secata terstruktur dalam penelitian

BAB V : DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Ketimpangan Pembangunan

Penelititan Mudrajad (2003) yang meneliti Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000 dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, Hipotesis Kuznetz, Indeks Williamsin dan Indeks Theil. Penelitian ini menjelaskan bahwa tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan perkapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk

kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

Penelitian Saputro (2010) meneliti Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sedangkan jumlah obyek wisata dan investasi di industri pariwisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. Pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi baik untuk dipergunakan untuk memprediksi penerimaan daerah sektor pariwisata. Sedangkan penerimaan daerah sektor pariwisata mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, investasi di industri pariwisata dan PDRB sebesar 51,8%.

Penelitian Saragih (2009) yang meneliti Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Data dalam kurun waktu 1975-2007 dengan di olah menggunakan metode OLS. Hasil estimasi data time series dengan model Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan sektor industry mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian Barika (2012) yang meneliti analisis ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten / kota di provinsi bengkulu tahun 2005 – 2009

dengan menggunakan metode Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dan Regresi Berganda. Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Untuk metode Theil didapatkan nilai indeksentropi periode tahun 2005-2009, rata-ratasebesar 0,93 dimana selam lima tahun terakhir indeks entropi cenderungfluktuatif yakni sebesar 0,94 pada tahun 2005 turun menjadi 0,91 pada tahun 2008 dan naik kembali menjadi 0,95 pada tahun 2009. Sedangkan indeks williamson sejaktahun 2005 hingga 2007 nilainya tetapsebesar 0,114 menjadi meningkat padatahun 2008 sebesar 0,131 dan turun kembali pada tahun 2009 menjadi 0,124. Sedangkan Berdasarkan hasil analisis Regresi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Adapun pengujian untuk variabel jumlah penduduk, probabilitas sebesar 0,0006 yang berarti signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Sementara itu Probabilitas Investasi sebesar 0,0051 yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

Penelitian Jamzani (2010) yang meneliti ketimpangan pendapatan regional di DIY-Jawa Tengah serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengunakan metode Regresi dengan data panel. Penelitian ini berkesimpulan bahwa bahwa pertumbuhan modal asing (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah. bahwa ekspor (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regioanal di DIY dan Jawa tengah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah.

Penelitian Herwin (2011) menyatakan bahwa kontribusi sektor primer yang tinggi terhadap PDRB, tidak menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang proporsional. Namun adanya pembangunan telah menciptakan transformasi strutur ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2001-2008. Meskipun proporsi dan laju pertumbuhan yang dianalisis dengan jumlah penduduk menunjukan adanya ketimpangan pada PDRB perkapita. Hasil penggunaan regresi, menunjukan pada model indeks Williamson, PDRB perkapita signifikan serta IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada model Indeks Gini, variabel PDRB perkapita tidak signifikan sedangkan IPM dan RBI signifikan negatif sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan hubungan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo menunjukan koefisien regresi yang positif, setiap perubahan pertumbuhan ekonomi menyebabkan nilai ketimpangan meningkat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multi dimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan prosespembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi

tinggi (Arsyad, 1999: 117). Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

a. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
c. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan stategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
e. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
f. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
g. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznets dalam Pressman (2000) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Definisi mengenai teori pertumbuhan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Meskipun begitu, terdapat beberapa teori yang secara parsial telah mengarahkan pada pemahaman mengenai arti penting dari suatu pembangunan ekonomi daerah.

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

   Teori ini tidak memiliki dimensi spasial (ruang) yang signifikan, namun teori ekonomi klasik memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan

ekonomi daerah, yakni keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Dengan kata lain, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan jika modal (dari faktor produksi) dapat mengalir tanpa pembatasan.

2. Teori Basis Ekonomi Teori ini menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Jika sumber daya lokal yakni tenaga kerja dan bahan baku untuk industri dipasok secara lokal, maka akan tercipta kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Namun, model ini didasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal sehingga memiliki ketergantungan terhadap kekuatan pasar baik nasional maupun internasional.
3. Teori Lokasi Lokasi berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah, karena perusahaan umumnya cenderung meminimumkan biaya dengan cara mencari lokasi yang dekat dengan pasar. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi adalah upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah, serta sanitasi. Meskipun begitu, perkembangan teknologi dan komunikasi telah menjadikan teori ini kurang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah.
4. Teori Tempat Sentral

   Hirarki tempat selalu dianggap keberadaannya oleh teori ini. Jika terdapat suatu tempat sentral, maka tempat sentral tersebut didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya berupa industri

dan bahan baku. Dalam konteks masa kini, teori tempat sentral dapat diibaratkan sebagai kota metropolitan dengan kota penyangganya.

5. Teori Kausasi Kumulatif

   Konsep dasar dari teori ini adalah buruknya kondisi daerah di sekitar kota. Hal ini didasarkan pada semakin menguatnya kekuatan pasar yang memperparah kesenjangan diantara kota dan daerah. Menurut Myrdal (1957), fenomena ini disebut dengan *backwash effects*, dimana daerah yang maju lebih unggul dibandingkan daerah yang terbelakang dan akan terus berlanjut.

6. Teori Daya Tarik Industri

   Teori ini merupakan model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang didasari pada prinsip pemberian subsidi dan insentif. Masyarakat dianggap dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis jika masyarakat diberikan bantuan berupa subsidi dan insentif oleh pemerintah.

2.2.3 Teori Ketimpangan Pendapatan antar Daerah

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur–angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. (Sjafrizal,

2008). Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah.

Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004).

Menurut Kuncoro (2004), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor- faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah. Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang tidak

memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah.

2.2.4 Faktor-faktor Ketimpangan

Menurut Myrdal (1956), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009: 23) yaitu:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

2. Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivias kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi

penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa (perdagangan) antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan (baik internasional maupun antar wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi (*Factor Price Equilization*) akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi.

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di dalam suatu daerah, seperti: jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.

4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya terjadi bila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsenstrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia itulah yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah, dengan mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam empat kategori status pembangunan manusia yang telah dikeluarkan oleh UNDP. Empat kategori tersebut yaitu Rendah bila angka IPM < 50, Menengah bawah bila angka

50<IPM<66, Menengah atas bila angka 66<IPM<80, Tinggi bila angka IPM > 80 (Sumber: BPS Jateng).

Indek Pembangunan Manusia (Todaro dan Smith, 2004) mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM:

1. Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup
2. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga)
3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

2.2.6 Klasifikasi Industri di Indonesia

Menurut Saragih (2009) pembangunan industri di daerah merupakan bagian dari segi pembangunan industri secara nasional, dimana keberhasilan dari pembangunan industri di daerah merupakan salah satu kunci pokok suksenya pelaksanaan pembangunan industry nasioanl. Sektor industri, dalam hal ini adalah industry besar dan sedang harus dikembangkan karena merupakan sektor yang potensial dalam embantu suksesnya pelaksanaan pembangunan, dimana sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, mempunyai peluang pasar yang lebih baik dibandingkan sektor lainya.

Di Indonesia industri digolongkan berdasarkan :

- kelompok komoditas
- skala usaha
- hubungan arus produknya

Penggolongan yang paling unversal ialah berdasarkan ”baku internasional klasifikasi industri/*Internasional Standard Of Industrial Classification* (ISIC)”. Penggolongan ISIC didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi, sertauntuk digunakan mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut masing-masing kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data kegiatan ekonomi antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional dapat dilakukan (Pasaribu, 1999)

Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga sub sektor yaitu :

- sub sektor industri pengolahan non migas
- sub sektor pengkilangan minyak bumi
- sub sektor pengolahan Gas alam cair.

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan beberapa lembaga dengan kriteria berbeda-beda, BPS membedakan skala industri menjadi empat lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha:

a. Industri Besar : Tenaga kerja 100 orang dan lebih
b. Industri Sedang : Tenaga kerja 20-99 orang
c. Industri Kecil : Tenaga kerja 5-19 orang
d. Industri Kerajinan Rumah tangga : Tenaga kerja 1-4 orang.

Sektor industri yang maju tentunya akan menghasilkan nilai tambah industry yang semakin meningkat pula. Peningkatan industry ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah dan mendorong rendahnya ketimpangan suatu daerah. Ketika industry daerah mulai meningkat maka peluang kerja akan meningkat. Ketimpangan suatu daerah di karenakan faktor tidak meratanya suatu pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan di daerah. Oleh sebab itu, ketimpangan daerah dapat turun ketika industri daerah muli meningkat. Dengan meningkatnya industri maka akan mendorong faktor faktor yang lain yang di harapkan akan mengurangi ketimpangan.

2.2.7 Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable Tourism Development) berdasarkan pada upaya pemberdayaan Empowerment), baik dalam arti ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu model pariwisata yang

mampu merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat lingkungan. serta menjamin kelestarian

Menurut Kartinah (2001) dalam penelitian Saputro (2015) sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik akan merupakan sumber PAD yang potensial pada era otonomi daerah yang terus dikembangkan karena peluang yang cukup besar. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata.

Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai ajakan pemerintah agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di waktu yang akan dating untuk tujuan ekonomi, sosial, keindahan yang dapat dijadikan daya tarik dengan memelihara integritas keanekaragaman budaya yang ditunjang sistem kehidupan. Inilah salah satu sektor unggulan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan melalui sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata merupakan sektor dari sumber alam dan itu masyarakat daerah hanya tinggal mengemas bagaimana agar terlihat menarik pengunjung sehingga suatu daerah yang dahulunya terpencil menjadi terkenal. Ketika meningkatnya sektor wisata maka suatu daerah akan mengalami peningkatan dari segi pendapatan dan penerimaan daerah. Sehingga dengan meningkatnya sektor wisata maka akan diperoleh manfaat buat daerah untuk selalu mengembangkan agar masyarakat daerah dapat terjun langsung dalam

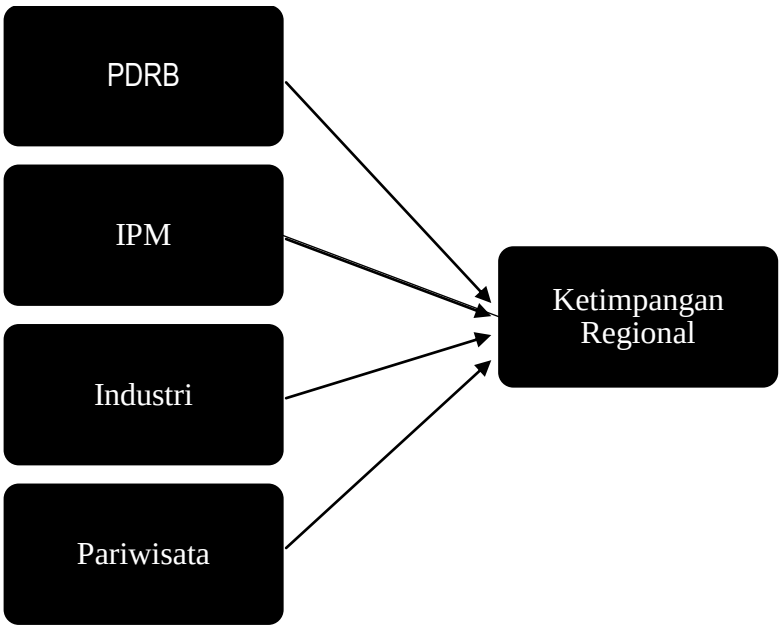
mengolah sumber pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Ketika semua msyarakat daerah dapat terjun pada sektor pariwisata semula yang tidak mendapatkan penghasilan maka dengan adanya pengembangan sektor pariwisata maka akan mendapatkan penghasilan dan dapat mebgurangi angka ketimpangan suatu daerah dan daerah tidak tertingal dengan daerah lain karena mempunyai daerah unggulan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependent (terikat)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga Industri berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga Pariwisata berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah**.**

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data runtut waktu (*time series*) dan data (*cross-section*) dari tahun 2011-2015, maka menggunakan Data Panel. Sumber data yang diperoleh dari hasil publikasi BPS dalam angka Jawa Tengah.

3.2 Definisi operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Ketimpangan Regional

Dalam penulisan ini yang menjadi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya adalah ketimpangan regional (Y) adalah kondisi dimana terjadi ketimpangan regional antar wilayah yang dapat dipicu oleh perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kondisi infrastruktur antar wilayah. Dalam penelitian ini ketimpangan regional dihitung dengan menggunakan Indeks Entropi Theil.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah

3.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (menurut BPS) dinyatakan dalam indeks yang diukur dengan memadukan unsur pendidikan, kesehatan dan tingkat pengeluaran perkapita disesuaikan. Secara khusus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu: angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

3.2.2.3 Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri

3.2.2.4 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

3.3.Metode Analisis

3.3.1 Analisis Ketimpangan dengan metode Indeks Entropi Theil

Untuk menganalisis indeks Entropi Theil dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang terjadi antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto Kabupaten dengan menggunakan alat analisis ketimpangan Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Metode indeks ketimpangan Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2002)

$$I(y) = \Sigma\,(yj / Y) x \log\,[(yj / Y) / (xj / X)]$$

Keterangan:

Yj: PDRB per kapita Kota j

Y: rata-rata PDRB per Provinsi

Xj: jumlah penduduk Kota j

X: jumlah penduduk Provinsi

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain dapat memakai indeks ketimpangan Williamson juga dapat menggunakan indeks ketimpangan Theil. Indeks ketimpangan Theil semakin membesar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar, dan apabila indeks ketimpangan Theil semakin kecil maka ketimpangan akan semakin rendah atau dengan kata lain semakin merata terjadinya pembangunan.

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi model data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan *cross section* dapat mengatasi nasalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*ommited-variabel*).(Widarjono, 2009: 250) Data panel merupakan data gabungan dari data time series dan data *cross section*, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Yit = \beta0 + \beta1X1it + \beta2X2it + \beta3X3it + \beta4X4it + eit$$

a. Metode Common Effect

Metode Common Effect merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam bentuk linear adalah sebagai berikut.

$$Yit = \beta0 + \beta1X1it + \beta2X2it + \beta3X3it + \beta4X4it + eit$$

b. Metode Fixed Effect

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi *(slope)* tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering

disebut dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV*) dan ketika terdapat heteroskeditisitas menggunakan fixed effect dengan cross section weight.

$$Yit = \beta0 + \beta1\ X1it + \beta2\ X2it + \beta3\ X3it + \beta4\ X4it + \ldots + eit$$

Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan interep antara variable independen namu intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar daerah dan antar waktu. (Widarjono, 2009: 232)

c. Metode Random Effect

Metode ini memilih estimasi data penel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap propinsi mempunyai intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variable random. Model *random effect* ditulis dalan model regresi linear sebagai berikut:

$$Yit = \beta0 + \beta1X1it + \beta2X2it + \beta3X3it + \beta4X4it + eit$$

3.3.2.1 Pemilihan Model dalam Pengolahan data

Dalam bagian ini ada dua tahap untuk mendapatkan model yang terbaik. Pertama, uji dengan membandingkan antara model *fixed effect* dengan *common effect* yang biasa disebut *signifikansi fixed effect.* Kedua uji dengan membandingkan antara metode fixed effect dengan random effect yang biasa disebut uji hausman (Sriyana, 2014)

a. Memilih model Common Effect atau Model Fixed Effect

Tahap pertama pengujian pemilihan model adalah menguji antara *common effect* dan *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi *slope* dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effect*), ataukah diperlukan penambahan variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effect*). Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut :

$$\text{Fhitung} = \frac{(\text{RRSS}-\text{RSS2})/(\text{i}-1)}{\text{RSS2}/(\text{it}-\text{i}-\text{k})}$$

Dimana RSS1 dan RSS2 masing-masing adalah residual sum of squares dari model common effect tanpa variabel dummy dan model fixed effect dengan variabel dummy; i=jumlah individu; t = jumlah periode wakt; k = banyaknya parameter dalam model fixed effect

Nilai F hitung yang diperoleh selanjutnya diuji berdasarkan nilai F tabel dengan F statistik. Kesimpulanya adalah jika nilai Fstatistik yang dihasilkan lebih besar dibandingkan nilai F-tabel , maka menolak hipotesis nol sehingga regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dibandingkan dengan common effect

b. Pemilihan Model Fixed Effect atau Model Random Effect

Uji pemilihan model fixed effect dan random effect dilakukan dengan asumsi bahwa kedua model pendekatan tersebut adalah lebih baik dibandingkan dengan model OLS. Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui model yang baik diantara model LSDV pada pendekatan fixed effect

dan GLS pada pendekatan random effect. Uji ini dilakukan dengan mengestimasi nilai m dengan rumus sebagai berikut:

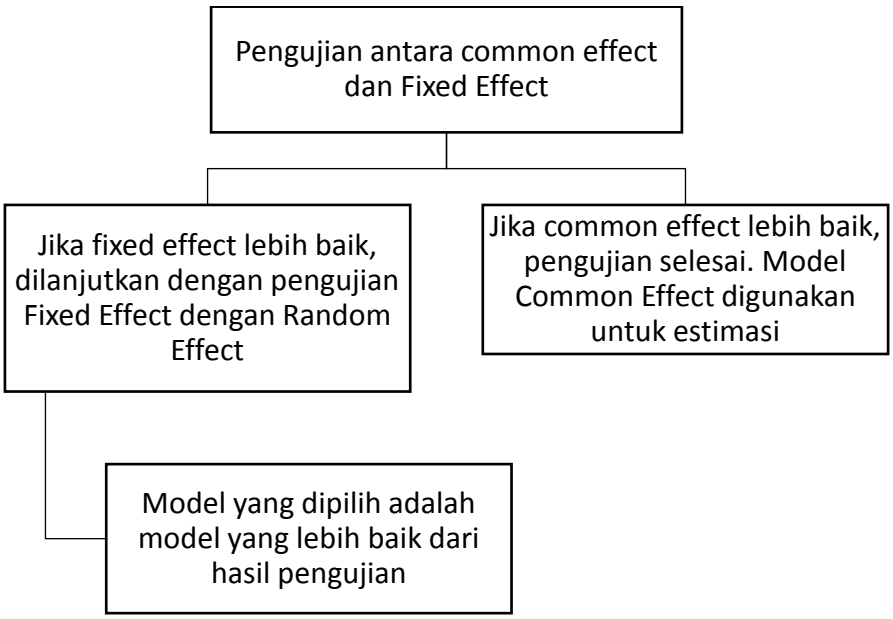
$$M = \hat{q}\,\text{Var}\,(\hat{q})^{-1}\,\hat{q}$$

Dimana $\hat{q} = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$ dan $\text{Var}(\hat{q}) = \text{Var}(\hat{\beta}) - \text{Var}(\hat{\beta})_{GLS}$

Nilai statistik dari uji Hausman mengikuti distribusi statistik X^2 dengan df sebanyak k, yaitu jumlah variabel independen. Jika nilai hitung uji Hausman lebih besar dari tabel X^2, maka model LSDV dengan pendekatan fixed effect lebih tepat digunakan, sedangka jika nilai hitung uji Hausman lebih kecil arinilai tabel X^2, maka model GLS dengan pendekatan random effect lebih tepat digunakan (Greene, 2000:576-577).

Tabel 3.1

Penjelasan ringkas pemilihan model Data Panel



3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji t (Pengujian variabel secara individu)

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu.

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variable independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.Sebaliknya, jika Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.. Sebaliknya, bila probabilitas > 0.05, berarti independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.3.3.2 Uji f (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Bersama-sama)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.Sebaliknya, jika Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha

diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, bila probabilitas > 0.05, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terhadap variabel dependen secara signifikan. Hipotesis yang digunakan:

- H0 : $\beta1 = \beta2 = \beta3 = \beta4 = \beta5 = 0$
- Ha : paling tidak terdapat satu β tidak sama dengan nol

3.3.3.4 Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan olehgaris regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi byang kurang baik. (Widarjono, 2009)

Nilai R2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1($0 \leq R2 \leq 1$). Semakin besar nilai R2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya semakin kecil nilai R2, maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel selama 5 tahun dari 2011 – 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent (penjelas) berpengaruh terhadap variabel dependen (yang dijelaskan). Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Y adalah Indeks Theil (Ketimpangan) antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
2. X_1 adalah PDRB antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
3. X_2 adalah IPM antar antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
4. X_3 adalah jumlah Industri antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
5. X_4 adalah jumlah Pariwisata antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah

4.2 Hasil Uji Model Regresi Panel

4.2.1 Pemilihan model dalam pengolahan data

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuh penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini di tunjukkan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Untuk itu, perlu dilihat masing-masing hasil estimasi dari berbagai model panel data sebagai berikut :

4.2.1.1 Uji Signifikansi F

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect,* dengan uji hipotesis :

a. Ho: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect.*
b. H1: memilih menggunakan model estimasi *fixed effect.*

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect,* apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effect.*

Tabel 4.1

Hasil Signifikansi F

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: HANIF
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3020.599004	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	1159.941902	34	0.0000

(Data olahan Eviews 9)

Nilai distribusi statistik *Cross Section Chi-square* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9* adalah sebesar 1159.941902 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5 %), sehingga statistik Ho di tolak dan menerima H1, menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect.*

4.2.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang akan di gunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut:

a. Ho: memilih menggunakan model estimasi *Random Effect.*
b. H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect.*

Uji Hausman ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value*, apabila *pvalue* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang di gunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya bila p-value tidak signifikan (lebih dari 5%) maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect.*

Tabel 4.2

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: HANIF
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.338895	4	0.0000

(Data olahan Eviews 9)

Nilai distribusi statistik *Cross-section random* dari perhitungan diatas adalah sebesar 28.338895 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik H1 di terima dan Ho di tolak. Maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect.*

4.2.1.3 Estimasi *Fixed Effect*

Estimasi ini merupakan teknik mengestimasi data panel menggunakan variable dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar variabel namun intersep waktunya sama. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variable dan antar waktu. Berikut estimasi dari *Fixed Effect.*

Tabel 4.3

Hasil Estimas Fixed Effect

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/13/17 Time: 15:32
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.028893	0.005216	5.539011	0.0000
LOG(X1?)	0.007247	0.001733	4.182395	0.0001
X2?	-0.000555	0.000136	-4.086309	0.0001
LOG(X3?)	-0.000284	0.000203	0.139499	0.8893
LOG(X4?)	-0.000255	0.000141	-1.805794	0.0732

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999151	Mean dependent var	0.010106
Adjusted R-squared	0.998914	S.D. dependent var	0.015248
S.E. of regression	0.000503	Akaike info criterion	-12.16010
Sum squared resid	3.44E-05	Schwarz criterion	-11.45480
Log likelihood	1103.008	Hannan-Quinn criter.	-11.87401
F-statistic	4211.433	Durbin-Watson stat	0.670805
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Data olahan Eviews 9)

a. Cross Effect

Tabel 4.4 Cross Effect

No	KABUPATEN/KOTA	KOEFISIEN
1	KOTA MAGELANG	0.058822
2	KOTA SALATIGA	0.048577
3	KUDUS	0.037048
4	KOTA SURAKARTA	0.030989
5	KOTA TEGAL	0.027396
6	KOTA PEKALONGAN	0.008976
7	CILACAP	-0.016999
8	KENDAL	-0.011786
9	SEMARANG	-0.010130
10	SRAGEN	-0.010079
11	BATANG	-0.009089
12	PATI	-0.008718
13	TEMANGGUNG	-0.008476
14	BREBES	-0.008464
15	WONOGIRI	-0.008278
16	SUKOHARJO	-0.007860
17	KARANGANYAR	-0.007253
18	PURBALINGGA	-0.007188
19	WONOSOBO	-0.007125
20	REMBANG	-0.006816
21	BANJARNEGARA	-0.006799
22	BLORA	-0.006792
23	BOYOLALI	-0.006597
24	PEKALONGAN	-0.006532
25	MAGELANG	-0.006460
26	PEMALANG	-0.006447
27	BANYUMAS	-0.006291
28	KEBUMEN	-0.005721
29	KLATEN	-0.005274
30	TEGAL	-0.005009
31	PURWOREJO	-0.004615
32	KOTA SEMARANG	-0.004564
33	JEPARA	-0.004352
34	DEMAK	-0.004101
35	GROBOGAN	-0.003994

(Sumber: Data olahan Eviews)

b. Periode Effect

Tabel 4.5

Periode Effect

Date	Effect
1/1/2011	0.002386
1/1/2012	0.001131
1/1/2013	0.000295
1/1/2014	-0.001236
1/1/2015	-0.002311

(Sumber: Data olahan Eviews)

4.2.2 Pengujian Hipotesis

4.2.2.1 Uji T

Tabel 4.6

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.028893	0.005216	5.539011	0.0000
LOG(X1?)	0.007247	0.001733	4.182395	0.0001
X2?	-0.000555	0.000136	-4.086309	0.0001
LOG(X3?)	-0.000284	0.000203	-0.139499	0.8893
LOG(X4?)	-0.000255	0.000141	-1.805794	0.0732

(Data olahan Eviews 9)

a) Pengujian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (X1)

Koefisien variabel dari PDRB adalah 0.007247 dan t-hitung sebesar 4.182395 sedangkan probabilitas sebesar 0.0001 (< 5%), Secara statistik menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap variabel Ketimpangan(Y), jadi apabila pertumbuhan PDRB meningkat 1% maka Ketimpangan Pembangunan naik 0.007247. Itu artinya H1 di tolak dan menerima Ho.

b) Pengujian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Koefisien variabel dari IPM adalah -0.000555 dan t-hitung sebesar -4.086309 sedangkan probabilitas sebesar 0.0001 (< 5%), Secara statistik menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap variabel Ketimpangan(Y), jadi apabila IPM naik 1% maka Ketimpangan Pembangunan turun 0.000555. Itu artinya H1 di tolak dan menerima Ho.

c) Pengujian terhadap Industri (X3)

Koefisien variabel dari Industri adalah -0.000284 dan t-hitung sebesar -0.139499 sedangkan probabilitas sebesar 0.8893 (> 5%), Secara statistik menunjukan bahwa variabel Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan(Y)

d) Pengujian terhadap Pariwisata (X4)

Koefisien variabel dari Pariwisata adalah -0.000255 dan t-hitung sebesar -1.805794 sedangkan probabilitas sebesar 0.0732 (< 10%), Secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pariwisata berpengaruh negatif terhadap variabel Ketimpangan(Y), jadi apabila Pariwisata naik maka Ketimpangan Pembangunan turun -0.000255. Itu artinya H1 di tolak dan menerima Ho.

4.2.2.2 Uji F (Uji hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh)

Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka diperoleh nilai F-hitung sebesar 4211.433 dan nilai f-tabel yang diperoleh sebesar 2.424815 dengan tingkat signifikasi $\alpha = 0,05$ nilai itu diperoleh dengan numerator (k – 1) atau 5 – 1 = 4 dan

denumerator (n – k) atau 175 – 5 = 170. Maka dapat disimpulkan bahwa variable PDRB, IPM, industri dan pariwisata terhadap variabel dependen (F hitung > F tabel).

4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen Theil (Ketimpangan) dapat di jelaskan oleh variabel-variabel independen PDRB, IPM, Industri, Pariwisata. Pada model estimasi *Fixed effect,* R2 sebesar 0.999151 sehingga variasi Ketimpangan Pembangunan dapat di jelaskan oleh variabel PDRB, IPM, Industri, Pariwisata sebesar 99,9 % dan sisanya 1 % di jelaskan oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan dan Analisis

4.3.1. Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Yang berarti bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini

Hubungan positif yang terjadi antara PDRB dan ketimpangan pembangunan bisa disebabkan karena ketimpangan pada Negara/daerah sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru

dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Oleh sebab itulah, PDRB di Jawa Tengah cenderung sangat tinggi di daerah kota, sedangkan daerah yang tertinggal tidak banyak mengalami kemajuan.

Nilai PDRB tiap kabupaten/kota tidaklah sama, bahwa pertumbuhan ekonomi antar daerah tidaklah lancar, tetapi cenderung terkosentrasi pada daerah-daerah tertentu yang memiliki keuntungan lokasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi cenderung terkosentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya kosentrasi kegiatan ekonomi (Sjafrizal, 2008: 127).

4.3.2. Analisis Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Yang berarti bahwa peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini

Menurut Becker (Tarmizi, 2010) menyatakan bahwa peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa

pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

4.3.3. Analisis Pengaruh Industri terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan Industri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Yang berarti bahwa peningkatan Industri tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini

Hubungan tidak signifikan yang terjadi antara Industri terhadap ketimpangan pembangunan ini bisa disebabkan karena sektor industri di Jawa Tengah daya saingnya masih lemah. Penyebabnya karena industri yang ada di Jateng masih didominasi industri hulu yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Sedangkan industri hilir belum banyak berkembang. Dimana pendapatan di sektor industri antar wilayah di Jawa Tengah belum berdampak terhadap ketimpangan pembangunan

4.3.4. Analisis Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan Pariwisata berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Yang berarti bahwa peningkatan Pariwisata akan menurunkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik serta pertumbuhan pendapatan dari subsektor perdagangan, hotel, dan setoran terhadap kinerja perekonomian. Perkembangan sektor pariwisata mendorong kinerja perekonomian wilayah yang dapat dilihat dari indikator pertumbuhan pendapatan daerah. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan pertama-tama akan menciptakan dampak langsung terhadap subsektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selanjutnya perkembangan pariwisata memberikan pengaruh yang berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Sehingga sektor pariwisata akan menurunkan ketimpangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di jawa tengah dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi cenderung terkosentrasi pada daerah-daerah tertentu yang memiliki keuntungan lokasi. Maka semakin meningkat PDRB maka ketimpangan pembangunan akan naik pula
2. Variabel IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Maka semakin meningkat IPM, maka ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota akan menurun
3. Variabel Industri tidak berpengaruh sigmifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena sektor industri yang ada di Jateng masih didominasi industri hulu yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi sehingga daya saingnya lemah dan tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan

4. Variabel Pariwisata berpengarh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini terjadi kaerna perkembangan pariwisata memberikan pengaruh peningkatan produktivitas yang berantai terhadap sektor-sektor ekonomi di daerah. Maka semakin meningkat pariwisata, maka ketimpangan pembangunan akan turun

5.2 Implikasi

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini adalah:

1. Dalam proses pembangunan, pemerintah diharapkan mampu menetapkan regulasi yang unggul demi mengacu pada pertumbuhan dengan tujuan pemerataan agar kesejahteraan masyarakat dari berbagai kalangan dapat tercapai, terutama masyarakat kalangan menengah kebawah. Sehingga permasalahan ketimpangan dapat teratasi dengan baik.
2. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahapan-tahapan untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariffin, Zainal. (2009). Kesenjangan dan Konvergensi Ekonomi antar Kabupaten pada empat koridor di Provinsi Jawa Timur. *HUMANITY, Volume IV, Nomor 2, Maret 2009: 154 - 164*.

Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: bagian penerbitan sekolah tinggi ekonomi YKPN.

Barika. (2012). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabpupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. *Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP), 04. NO. 03, JANUARI - JUNI 2012*(1979-7338).

Eko, Saputro. (2015). Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Sekabupaten/kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang*.

Hartasi, Sarigih. (2009). Analisis Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan. *Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan*.

Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Analisis Spasial dan Regional Yogyakarta.* Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & pembangunan daerah.* Erlangga.

Masli, Lili. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi Ilmu Ekonomi dan bisnis*.

Mopangga, Herwin. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 40-51.

Sjafrizal, Prof. (2008). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.* Baduose Media.

Sodik, Jamzani. Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (2000-2004). *Buletin Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, April 2010

Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel.* Yogyakarta: Ekonisia.

Sutarno, & Kuncoro, M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8 No. 2, Desember 2003*, 97-110.

Tarmizi, Hasan. B. (2010). Analisis pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan antar sektor di Kota Medan: laporan penelitian disertasi doktor: ilmu ekonomi. Universitas Sumatera Utara.

Todaro, Michael P. "E*konomi pembangunan di dunia ketiga." Terjemahan oleh Haris Munandar*, Edisi ke tujuh, Erlangga, Jakarta (2000)..

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya* (2nd ed.). Yogyakarta: Ekonisia.

.Yoeti, Oka. A. (2008). Ekonomi pariwisata: Introduksi, informasi, dan implementasi. *Jakarta (ID): Kompas.*

LAMPIRAN

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)					
	2011	2012	2013	2014	2015
01. Kab. Cilacap	75,099,089.89	78,156,818.82	79,702,237.61	81,369,806.41	83,775,740.98
02. Kab. Banyumas	23,016,943.39	24,538,595.63	25,982,158.22	27,772,165.06	29,098,389.63
03. Kab. Purbalingga	10,858,631.52	11,474,221.22	12,138,445.34	12,819,159.66	13,554,296.77
04. Kab. Banjarnegara	9,439,359.00	9,952,403.66	10,473,363.43	11,024,783.01	11,583,435.69
05. Kab. Kebumen	12,311,421.83	13,068,985.50	13,707,057.24	14,344,827.43	15,176,441.62
06. Kab. Purworejo	8,513,490.56	8,993,814.30	9,406,242.93	9,886,889.95	10,344,988.27
07. Kab. Wonosobo	9,005,925.54	9,489,550.46	9,935,905.32	10,457,817.95	10,892,939.11
08. Kab. Magelang	14,363,230.57	15,323,039.48	16,071,142.55	17,083,608.71	17,915,809.49
09. Kab. Boyolali	13,721,701.47	14,592,026.26	15,369,974.36	16,265,748.68	17,085,661.59
10. Kab. Klaten	17,002,049.66	18,071,350.51	19,102,402.71	20,299,990.92	21,391,717.78
11. Kab. Sukoharjo	16,357,221.65	17,319,638.62	18,342,247.26	19,403,138.94	20,423,511.80
12. Kab. Wonogiri	13,310,571.10	13,786,711.34	14,605,088.22	15,305,297.58	16,109,707.79
13. Kab. Karanganyar	16,393,788.72	17,205,063.88	18,189,076.66	19,224,635.92	20,208,968.35
14. Kab. Sragen	15,832,557.66	16,870,231.27	17,902,104.86	19,102,981.59	20,170,942.51
15. Kab. Grobogan	12,766,021.74	13,172,711.96	13,842,047.14	14,471,228.93	15,053,762.36
16. Kab. Blora	10,149,079.63	10,597,723.01	11,116,865.90	11,712,504.85	12,227,201.29
17. Kab. Rembang	8,373,546.87	8,808,302.78	9,277,163.23	9,778,950.39	10,282,184.04
18. Kab. Pati	18,782,546.64	19,893,325.24	21,072,328.70	22,314,753.78	23,327,059.31
19. Kab. Kudus	52,933,496.31	55,175,794.89	57,440,810.51	60,042,549.60	62,603,070.44
20. Kab. Jepara	13,347,321.26	14,073,724.43	14,769,976.66	15,634,312.65	16,351,578.25
21. Kab. Demak	11,647,735.65	12,275,702.69	12,823,227.04	13,499,226.47	14,075,691.75
22. Kab. Semarang	21,572,136.87	22,925,456.80	24,306,718.35	25,976,021.08	27,534,876.57
23. Kab. Temanggung	9,710,199.27	10,301,569.79	10,740,983.02	11,400,498.28	11,987,831.59
24. Kab. Kendal	18,798,278.37	20,032,434.32	21,075,717.33	22,324,823.54	23,463,053.00
25. Kab. Batang	9,447,328.38	10,025,044.65	10,488,456.63	11,101,126.78	11,690,342.11
26. Kab. Pekalongan	10,254,315.35	10,834,201.09	11,354,849.90	12,034,805.89	12,627,134.32
27. Kab. Pemalang	11,282,196.10	11,847,199.06	12,477,235.25	13,166,859.41	13,893,576.37
28. Kab. Tegal	15,106,509.91	16,071,820.41	16,912,249.74	18,053,605.08	18,955,755.71
29. Kab. Brebes	20,158,107.77	21,498,422.48	22,482,262.67	23,823,556.92	25,091,713.29
30. Kota Magelang	4,010,718.18	4,255,662.21	4,484,268.08	4,755,269.18	4,987,376.44
31. Kota Surakarta	21,469,551.30	22,848,439.42	24,123,781.59	25,612,681.32	26,955,056.24
32. Kota Salatiga	5,845,475.81	6,230,219.49	6,574,907.26	6,986,909.99	7,322,580.36
33. Kota Semarang	80,824,099.97	86,142,966.70	91,282,029.07	97,340,978.65	102,501,385.64
34. Kota Pekalongan	4,624,260.08	4,878,332.22	5,151,813.52	5,456,187.06	5,755,282.26
35. Kota Tegal	6,895,713.33	7,341,540.16	7,650,479.56	8,067,375.73	8,473,076.16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka

Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

Kaupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
01. Kab. Cilacap	28	25	26	22	22
02. Kab. Banyumas	68	66	62	52	54
03. Kab. Purbalingga	90	87	89	84	90
04. Kab. Banjarnegara	24	22	18	18	18
05. Kab. Kebumen	186	226	206	203	203
06. Kab. Purworejo	14	14	3	14	14
07. Kab. Wonosobo	57	65	65	84	105
08. Kab. Magelang	76	74	66	71	72
09. Kab. Boyolali	104	94	77	75	77
10. Kab. Klaten	279	276	270	277	283
11. Kab. Sukoharjo	138	136	138	121	127
12. Kab. Wonogiri	12	15	15	14	15
13. Kab. Karanganyar	153	153	153	130	135
14. Kab. Sragen	47	14	48	51	50
15. Kab. Grobogan	19	20	19	20	26
16. Kab. Blora	22	13	11	13	23
17. Kab. Rembang	88	106	66	56	60
18. Kab. Pati	187	223	209	202	210
19. Kab. Kudus	169	166	173	182	182
20. Kab. Jepara	399	312	277	254	264
21. Kab. Demak	58	55	61	72	79
22. Kab. Semarang	116	117	112	124	135
23. Kab. Temanggung	27	35	44	59	58
24. Kab. Kendal	44	47	56	55	59
25. Kab. Batang	55	54	54	56	59
26. Kab. Pekalongan	317	310	315	282	315
27. Kab. Pemalang	150	128	129	112	115
28. Kab. Tegal	98	98	96	92	93
29. Kab. Brebes	39	46	45	92	95
30. Kota Magelang	26	25	24	26	25
31. Kota Surakarta	171	173	172	139	139
32. Kota Salatiga	23	27	26	32	32
33. Kota Semarang	314	303	325	300	328
34. Kota Pekalongan	204	195	179	172	173
35. Kota Tegal	85	97	93	110	116

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	64.73	65.72	66.8	67.25	67.77
Kabupaten Banyumas	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89
Kabupaten Purbalingga	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03
Kabupaten Banjarnegara	61.58	62.29	62.84	63.15	64.73
Kabupaten Kebumen	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87
Kabupaten Purworejo	69.11	69.4	69.77	70.12	70.37
Kabupaten Wonosobo	63.07	64.18	64.57	65.2	65.7
Kabupaten Magelang	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13
Kabupaten Boyolali	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74
Kabupaten Klaten	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81
Kabupaten Sukoharjo	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53
Kabupaten Wonogiri	64.75	65.75	66.4	66.77	67.76
Kabupaten Karanganyar	71	72.26	73.33	73.89	74.26
Kabupaten Sragen	68.12	68.91	69.95	70.52	71.1
Kabupaten Grobogan	65.41	66.39	67.43	67.77	68.05
Kabupaten Blora	63.88	64.7	65.37	65.84	66.22
Kabupaten Rembang	65.36	66.03	66.84	67.4	68.18
Kabupaten Pati	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51
Kabupaten Kudus	69.89	70.57	71.58	72	72.72
Kabupaten Jepara	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02
Kabupaten Demak	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75
Kabupaten Semarang	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89
Kabupaten Temanggung	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07
Kabupaten Kendal	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57
Kabupaten Batang	62.59	63.09	63.6	64.07	65.46
Kabupaten Pekalongan	64.72	65.33	66.26	66.98	67.4
Kabupaten Pemalang	59.66	60.78	61.81	62.35	63.7
Kabupaten Tegal	61.97	62.67	63.5	64.1	65.04
Kabupaten Brebes	60.51	60.92	61.87	62.55	63.18
Kota Magelang	74.47	75	75.29	75.79	76.39
Kota Surakarta	78	78.44	78.89	79.34	80.14
Kota Salatiga	78.76	79.1	79.37	79.98	80.96
Kota Semarang	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23
Kota Pekalongan	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69
Kota Tegal	70.03	70.68	71.44	72.2	72.96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka

Banyaknya Daya Tarik Wisata dan Event Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
01. Kab. Cilacap	14	14	25	25	25
02. Kab. Banyumas	12	14	14	20	17
03. Kab. Purbalingga	10	10	10	10	10
04. Kab. Banjarnegara	5	5	14	14	16
05. Kab. Kebumen	9	9	9	8	11
06. Kab. Purworejo	7	7	7	7	7
07. Kab. Wonosobo	6	6	7	7	7
08. Kab. Magelang	8	11	13	13	17
09. Kab. Boyolali	12	12	11	11	11
10. Kab. Klaten	14	14	13	13	13
11. Kab. Sukoharjo	2	2	2	2	2
12. Kab. Wonogiri	7	7	6	6	6
13. Kab. Karanganyar	20	19	19	19	19
14. Kab. Sragen	4	4	15	9	25
15. Kab. Grobogan	3	3	7	9	12
16. Kab. Blora	4	4	3	17	18
17. Kab. Rembang	6	6	6	5	6
18. Kab. Pati	4	4	13	17	24
19. Kab. Kudus	10	10	31	29	29
20. Kab. Jepara	10	16	18	18	21
21. Kab. Demak	6	6	6	6	6
22. Kab. Semarang	17	17	20	22	22
23. Kab. Temanggung	3	3	12	6	5
24. Kab. Kendal	4	4	9	6	25
25. Kab. Batang	6	6	5	5	8
26. Kab. Pekalongan	2	6	11	12	10
27. Kab. Pemalang	9	9	9	9	9
28. Kab. Tegal	3	3	3	4	5
29. Kab. Brebes	5	5	6	6	6
30. Kota Magelang	6	6	6	8	8
31. Kota Surakarta	9	10	10	10	10
32. Kota Salatiga	1	4	6	12	6
33. Kota Semarang	22	22	33	38	36
34. Kota Pekalongan	5	5	5	11	11
35. Kota Tegal	1	1	1	3	4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka

Penghitungan Ketimpangan dengan Indeks Theil

2011								
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk	PDRB Perkapita Kab/Kota	PDRB Perkapita Jateng	(yij/y)	(nij/n)	log. (yij/y)/(nij/n)	yij/y*log.(yij/y)/(nij/n)
	(nij)	(n)	(yij)	(y)				
01. Kab. Cilacap	1651.94	32644	45461.1	693758.8	0.0655288	0.050605307	0.112235837	0.007
02. Kab. Banyumas	1570.598	32644	14654.9	693758.8	0.0211239	0.048113487	-0.357492729	(0.008)
03. Kab. Purbalingga	858.798	32644	12644.0	693758.8	0.0182253	0.026308302	-0.159417251	(0.003)
04. Kab. Banjarnegara	875.214	32644	10785.2	693758.8	0.015546	0.026811187	-0.236696307	(0.004)
05. Kab. Kebumen	1162.294	32644	10592.3	693758.8	0.0152681	0.035605557	-0.367734078	(0.006)
06. Kab. Purworejo	696.141	32644	12229.5	693758.8	0.017628	0.021325489	-0.082697065	(0.001)
07. Kab. Wonosobo	758.993	32644	11865.6	693758.8	0.0171034	0.023250889	-0.133357487	(0.002)
08. Kab. Magelang	1194.353	32644	12026.0	693758.8	0.0173345	0.036587648	-0.324423575	(0.006)
09. Kab. Boyolali	936.822	32644	14647.1	693758.8	0.0211126	0.028698479	-0.133316493	(0.003)
10. Kab. Klaten	1135.201	32644	14977.1	693758.8	0.0215884	0.034775594	-0.207054548	(0.004)
11. Kab. Sukoharjo	832.094	32644	19657.9	693758.8	0.0283354	0.025490255	0.04595446	0.001
12. Kab. Wonogiri	929.87	32644	14314.4	693758.8	0.0206332	0.028485512	-0.140058081	(0.003)
13. Kab. Karanganyar	821.694	32644	19951.2	693758.8	0.0287581	0.025171663	0.057848804	0.002
14. Kab. Sragen	861.939	32644	18368.5	693758.8	0.0264768	0.026404523	0.001187717	0.000
15. Kab. Grobogan	1316.693	32644	9695.5	693758.8	0.0139753	0.040335395	-0.460323772	(0.006)
16. Kab. Blora	833.786	32644	12172.3	693758.8	0.0175454	0.025542088	-0.163092835	(0.003)
17. Kab. Rembang	596.801	32644	14030.7	693758.8	0.0202242	0.018282321	0.043840073	0.001
18. Kab. Pati	1198.935	32644	15666.0	693758.8	0.0225814	0.036728013	-0.211247099	(0.005)
19. Kab. Kudus	788.264	32644	67152.0	693758.8	0.0967944	0.024147573	0.602976897	0.058
20. Kab. Jepara	1115.688	32644	11963.3	693758.8	0.0172442	0.034177835	-0.297101708	(0.005)
21. Kab. Demak	1067.993	32644	10906.2	693758.8	0.0157204	0.032716753	-0.318305605	(0.005)
22. Kab. Semarang	944.877	32644	22830.6	693758.8	0.0329086	0.028945234	0.055732314	0.002
23. Kab. Temanggung	715.907	32644	13563.5	693758.8	0.0195507	0.021930998	-0.049895373	(0.001)
24. Kab. Kendal	908.533	32644	20690.8	693758.8	0.0298242	0.027831877	0.030026365	0.001
25. Kab. Batang	713.942	32644	13232.6	693758.8	0.0190738	0.021870803	-0.05942715	(0.001)
26. Kab. Pekalongan	845.471	32644	12128.5	693758.8	0.0174823	0.025900044	-0.17070106	(0.003)
27. Kab. Pemalang	1264.535	32644	8922.0	693758.8	0.0128604	0.038737594	-0.478878363	(0.006)
28. Kab. Tegal	1399.789	32644	10792.0	693758.8	0.0155558	0.042880947	-0.440371311	(0.007)
29. Kab. Brebes	1742.528	32644	11568.3	693758.8	0.0166748	0.053380367	-0.505320066	(0.008)
30. Kota Magelang	118.606	32644	33815.5	693758.8	0.0487424	0.00363336	1.12759853	0.055
31. Kota Surakarta	501.65	32644	42797.9	693758.8	0.0616898	0.015367478	0.603611037	0.037
32. Kota Salatiga	173.056	32644	33777.9	693758.8	0.0486883	0.005301374	0.963036247	0.047
33. Kota Semarang	1585.417	32644	50979.7	693758.8	0.0734833	0.04856745	0.179843558	0.013
34. Kota Pekalongan	284.413	32644	16259.0	693758.8	0.023436	0.008712669	0.429733067	0.010
35. Kota Tegal	240.777	32644	28639.4	693758.8	0.0412815	0.00737593	0.747938903	0.031

Sumber: Data Olahan Excell

2012								
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk	PDRB Perkapita Kab/Kota	PDRB Perkapita Jateng	(yij/y)	(nij/n)	log. (yij/y)/(nij/n)	yij/y*log.(yij/y)/(nij/n)
	(nij)	(n)	(yij)	(y)				
01. Kab. Cilacap	1679.864	33270.2	46525.7	718825.45	0.0647246	0.05049154	0.107850686	0.007
02. Kab. Banyumas	1603.037	33270.207	15307.6	718825.45	0.0212952	0.048182357	-0.354605331	(0.008)
03. Kab. Purbalingga	877.489	33270.207	13076.2	718825.45	0.0181911	0.026374618	-0.161328085	(0.003)
04. Kab. Banjarnegara	890.962	33270.207	11170.4	718825.45	0.0155398	0.026779575	-0.236358323	(0.004)
05. Kab. Kebumen	1181.678	33270.207	11059.7	718825.45	0.0153858	0.035517603	-0.363324366	(0.006)
06. Kab. Purworejo	708.483	33270.207	12694.5	718825.45	0.01766	0.021294818	-0.081282894	(0.001)
07. Kab. Wonosobo	771.447	33270.207	12301.0	718825.45	0.0171126	0.023187322	-0.131934492	(0.002)
08. Kab. Magelang	1219.371	33270.207	12566.3	718825.45	0.0174818	0.036650538	-0.321494746	(0.006)
09. Kab. Boyolali	953.317	33270.207	15306.6	718825.45	0.0212939	0.028653774	-0.128927015	(0.003)
10. Kab. Klaten	1153.047	33270.207	15672.7	718825.45	0.0218032	0.034657043	-0.201271353	(0.004)
11. Kab. Sukoharjo	848.718	33270.207	20406.8	718825.45	0.0283891	0.02550985	0.046444058	0.001
12. Kab. Wonogiri	946.373	33270.207	14567.9	718825.45	0.0202663	0.028445059	-0.147231942	(0.003)
13. Kab. Karanganyar	838.762	33270.207	20512.5	718825.45	0.0285361	0.025210604	0.053810854	0.002
14. Kab. Sragen	875.283	33270.207	19274.0	718825.45	0.0268132	0.026308312	0.008256107	0.000
15. Kab. Grobogan	1339.127	33270.207	9836.8	718825.45	0.0136845	0.040250035	-0.46853628	(0.006)
16. Kab. Blora	847.125	33270.207	12510.2	718825.45	0.0174037	0.02546197	-0.165250375	(0.003)
17. Kab. Rembang	608.548	33270.207	14474.3	718825.45	0.020136	0.018291079	0.041734614	0.001
18. Kab. Pati	1219.993	33270.207	16306.1	718825.45	0.0226844	0.036669234	-0.208575237	(0.005)
19. Kab. Kudus	807.005	33270.207	68371.1	718825.45	0.095115	0.024256086	0.593428205	0.056
20. Kab. Jepara	1144.916	33270.207	12292.4	718825.45	0.0171006	0.03441265	-0.303706148	(0.005)
21. Kab. Demak	1091.379	33270.207	11247.9	718825.45	0.0156476	0.032803493	-0.321472766	(0.005)
22. Kab. Semarang	968.383	33270.207	23674.0	718825.45	0.0329342	0.029106612	0.053655742	0.002
23. Kab. Temanggung	730.72	33270.207	14097.8	718825.45	0.0196123	0.021963194	-0.049166522	(0.001)
24. Kab. Kendal	926.325	33270.207	21625.7	718825.45	0.0300848	0.027842478	0.033639015	0.001
25. Kab. Batang	728.578	33270.207	13759.7	718825.45	0.019142	0.021898812	-0.058433733	(0.001)
26. Kab. Pekalongan	861.366	33270.207	12577.9	718825.45	0.0174979	0.02589001	-0.1701465	(0.003)
27. Kab. Pemalang	1285.024	33270.207	9219.4	718825.45	0.0128257	0.038623865	-0.478774734	(0.006)
28. Kab. Tegal	1421.001	33270.207	11310.2	718825.45	0.0157343	0.042710916	-0.433691638	(0.007)
29. Kab. Brebes	1770.48	33270.207	12142.7	718825.45	0.0168924	0.053215178	-0.498343399	(0.008)
30. Kota Magelang	120.447	33270.207	35332.2	718825.45	0.0491527	0.003620266	1.132807232	0.056
31. Kota Surakarta	509.58	33270.207	44838.1	718825.45	0.0623769	0.015316286	0.60987067	0.038
32. Kota Salatiga	177.48	33270.207	35103.8	718825.45	0.0488349	0.005334502	0.961636565	0.047
33. Kota Semarang	1629.924	33270.207	52850.9	718825.45	0.073524	0.048990498	0.176317173	0.013
34. Kota Pekalongan	290.347	33270.207	16801.7	718825.45	0.0233739	0.008726937	0.427868745	0.010
35. Kota Tegal	244.632	33270.207	30010.5	718825.45	0.0417494	0.007352885	0.754192705	0.031

Sumber: Data Olahan Excell

2013								
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk	PDRB Perkapita Kab/Kota	PDRB Perkapita Jateng	(yij/y)	(nij/n)	log. (yij/y)/(nij/n)	yij/y*log.(yij/y)/(nij/n)
	(nij)	(n)	(yij)	(y)				
01. Kab. Cilacap	1676.089	33264	47552.5	754484.496	0.0630265	0.050386962	0.09720494	0.006
02. Kab. Banyumas	1605.579	33264	16182.4	754484.496	0.0214483	0.048267275	-0.352259557	(0.008)
03. Kab. Purbalingga	879.88	33264	13795.6	754484.496	0.0182848	0.026451149	-0.160355247	(0.003)
04. Kab. Banjarnegara	889.921	33264	11768.9	754484.496	0.0155986	0.026753004	-0.234288158	(0.004)
05. Kab. Kebumen	1176.722	33264	11648.5	754484.496	0.015439	0.03537488	-0.360074942	(0.006)
06. Kab. Purworejo	705.483	33264	13333.1	754484.496	0.0176717	0.021208388	-0.079228337	(0.001)
07. Kab. Wonosobo	769.318	33264	12915.2	754484.496	0.0171179	0.02312741	-0.130675765	(0.002)
08. Kab. Magelang	1221.681	33264	13154.9	754484.496	0.0174357	0.036726448	-0.323540308	(0.006)
09. Kab. Boyolali	951.817	33264	16148.0	754484.496	0.0214027	0.028613736	-0.126105194	(0.003)
10. Kab. Klaten	1148.994	33264	16625.3	754484.496	0.0220353	0.034541315	-0.195218947	(0.004)
11. Kab. Sukoharjo	849.506	33264	21591.7	754484.496	0.0286178	0.025538039	0.04944822	0.001
12. Kab. Wonogiri	942.377	33264	15498.1	754484.496	0.0205414	0.028329948	-0.139616593	(0.003)
13. Kab. Karanganyar	840.171	33264	21649.3	754484.496	0.0286941	0.025257409	0.055403857	0.002
14. Kab. Sragen	871.989	33264	20530.2	754484.496	0.0272109	0.026213928	0.016210662	0.000
15. Kab. Grobogan	1336.304	33264	10358.5	754484.496	0.0137292	0.04017227	-0.466281635	(0.006)
16. Kab. Blora	844.444	33264	13164.7	754484.496	0.0174486	0.025385864	-0.162830764	(0.003)
17. Kab. Rembang	608.903	33264	15235.9	754484.496	0.0201937	0.018304978	0.042647548	0.001
18. Kab. Pati	1218.016	33264	17300.5	754484.496	0.0229303	0.036616269	-0.203264877	(0.005)
19. Kab. Kudus	810.81	33264	70843.7	754484.496	0.0938969	0.024374752	0.585710945	0.055
20. Kab. Jepara	1153.213	33264	12807.7	754484.496	0.0169754	0.034668147	-0.310110672	(0.005)
21. Kab. Demak	1094.472	33264	11716.4	754484.496	0.015529	0.032902262	-0.326083401	(0.005)
22. Kab. Semarang	974.092	33264	24953.2	754484.496	0.0330732	0.029283372	0.052854953	0.002
23. Kab. Temanggung	731.911	33264	14675.3	754484.496	0.0194507	0.022002872	-0.053543941	(0.001)
24. Kab. Kendal	926.812	33264	22740.0	754484.496	0.0301398	0.02786203	0.034127647	0.001
25. Kab. Batang	729.616	33264	14375.3	754484.496	0.0190532	0.021933879	-0.061148534	(0.001)
26. Kab. Pekalongan	861.082	33264	13186.7	754484.496	0.0174778	0.02588604	-0.170579046	(0.003)
27. Kab. Pemalang	1279.596	33264	9750.9	754484.496	0.0129239	0.038467501	-0.473698806	(0.006)
28. Kab. Tegal	1415.009	33264	11952.0	754484.496	0.0158413	0.042538317	-0.428988443	(0.007)
29. Kab. Brebes	1764.648	33264	12740.4	754484.496	0.0168862	0.053049243	-0.497147581	(0.008)
30. Kota Magelang	119.935	33264	37389.2	754484.496	0.0495559	0.003605513	1.138128267	0.056
31. Kota Surakarta	507.825	33264	47504.1	754484.496	0.0629624	0.015266349	0.615345811	0.039
32. Kota Salatiga	178.594	33264	36814.8	754484.496	0.0487947	0.005368933	0.958484481	0.047
33. Kota Semarang	1644.8	33264	55497.3	754484.496	0.0735566	0.049446346	0.172487669	0.013
34. Kota Pekalongan	290.87	33264	17711.7	754484.496	0.0234753	0.008744199	0.428890851	0.010
35. Kota Tegal	243.86	33264	31372.4	754484.496	0.0415813	0.007330974	0.753736098	0.031

Sumber: Data Olahan Excell

2014								
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk	PDRB Perkapita Kab/Kota	PDRB Perkapita Jateng	(yij/y)	(nij/n)	log. (yij/y)/(nij/n)	yij/y*log.(yij/y)/(nij/n)
	(nij)	(n)	(yij)	(y)				
01. Kab. Cilacap	1685.63	33523	48272.6	789755.234	0.0611235	0.050283256	0.084785127	0.005
02. Kab. Banyumas	1620.77	33523	17135.2	789755.234	0.0216968	0.048348447	-0.347986693	(0.008)
03. Kab. Purbalingga	889.17	33523	14417.0	789755.234	0.018255	0.026524423	-0.162263698	(0.003)
04. Kab. Banjarnegara	896.04	33523	12303.9	789755.234	0.0155794	0.026729359	-0.234438396	(0.004)
05. Kab. Kebumen	1180.89	33523	12147.5	789755.234	0.0153813	0.035226588	-0.359877214	(0.006)
06. Kab. Purworejo	708.01	33523	13964.3	789755.234	0.0176819	0.021120322	-0.077172735	(0.001)
07. Kab. Wonosobo	773.39	33523	13522.0	789755.234	0.0171218	0.023070643	-0.129509679	(0.002)
08. Kab. Magelang	1233.7	33523	13847.5	789755.234	0.0175339	0.036801939	-0.321993166	(0.006)
09. Kab. Boyolali	957.91	33523	16980.5	789755.234	0.0215009	0.028574974	-0.123529008	(0.003)
10. Kab. Klaten	1154.03	33523	17590.5	789755.234	0.0222734	0.03442534	-0.189092006	(0.004)
11. Kab. Sukoharjo	856.86	33523	22644.5	789755.234	0.0286728	0.025560598	0.049898602	0.001
12. Kab. Wonogiri	945.68	33523	16184.4	789755.234	0.020493	0.028210147	-0.138800283	(0.003)
13. Kab. Karanganyar	848.33	33523	22661.7	789755.234	0.0286946	0.025306143	0.054574821	0.002
14. Kab. Sragen	875.62	33523	21816.5	789755.234	0.0276244	0.026120219	0.02431616	0.001
15. Kab. Grobogan	1343.99	33523	10767.4	789755.234	0.0136338	0.04009195	-0.468440313	(0.006)
16. Kab. Blora	848.39	33523	13805.6	789755.234	0.0174808	0.025307933	-0.16069495	(0.003)
17. Kab. Rembang	614.07	33523	15924.8	789755.234	0.0201642	0.018318041	0.041702829	0.001
18. Kab. Pati	1225.6	33523	18207.2	789755.234	0.0230542	0.036560312	-0.200259057	(0.005)
19. Kab. Kudus	821.11	33523	73123.6	789755.234	0.0925903	0.024494156	0.577502791	0.053
20. Kab. Jepara	1170.79	33523	13353.6	789755.234	0.0169086	0.0349253	-0.315032868	(0.005)
21. Kab. Demak	1106.21	33523	12203.1	789755.234	0.0154518	0.032998843	-0.329519929	(0.005)
22. Kab. Semarang	987.6	33523	26302.2	789755.234	0.0333042	0.029460643	0.053256814	0.002
23. Kab. Temanggung	738.88	33523	15429.4	789755.234	0.019537	0.022041191	-0.052377641	(0.001)
24. Kab. Kendal	934.63	33523	23886.3	789755.234	0.0302452	0.027880519	0.035354949	0.001
25. Kab. Batang	736.5	33523	15072.8	789755.234	0.0190854	0.021970194	-0.061132092	(0.001)
26. Kab. Pekalongan	867.7	33523	13869.8	789755.234	0.0175621	0.025883961	-0.168453757	(0.003)
27. Kab. Pemalang	1284.17	33523	10253.2	789755.234	0.0129828	0.038307487	-0.469916494	(0.006)
28. Kab. Tegal	1420.11	33523	12712.8	789755.234	0.0160972	0.04236265	-0.420233685	(0.007)
29. Kab. Brebes	1773.37	33523	13434.1	789755.234	0.0170104	0.052900588	-0.492745763	(0.008)
30. Kota Magelang	120.44	33523	39482.5	789755.234	0.0499933	0.00359279	1.14347996	0.057
31. Kota Surakarta	510.11	33523	50210.1	789755.234	0.0635768	0.015216858	0.620973719	0.039
32. Kota Salatiga	181.3	33523	38537.8	789755.234	0.0487972	0.005408277	0.955335888	0.047
33. Kota Semarang	1672.99	33523	58183.8	789755.234	0.0736733	0.049906198	0.169155366	0.012
34. Kota Pekalongan	293.72	33523	18576.2	789755.234	0.0235214	0.008761827	0.42886856	0.010
35. Kota Tegal	244.98	33523	32930.8	789755.234	0.0416974	0.007307886	0.756317372	0.032

Sumber: Data Olahan Excell

2015								
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Seluruh Penduduk	PDRB Perkapita Kab/Kota	PDRB Perkapita Jateng	(yij/y)	(nij/n)	log. (yij/y)/(nij/n)	yij/y*log.(yij/y)/(nij/n)
	(nij)	(n)	(yij)	(y)				
01. Kab. Cilacap	1694.73	33774	49433.1	821628.595	0.0601648	0.050178257	0.07882664	0.005
02. Kab. Banyumas	1635.91	33774	17787.3	821628.595	0.0216488	0.048436691	-0.349740463	(0.008)
03. Kab. Purbalingga	898.38	33774	15087.5	821628.595	0.0183629	0.026599602	-0.160933763	(0.003)
04. Kab. Banjarnegara	901.83	33774	12844.4	821628.595	0.0156328	0.026701751	-0.232502568	(0.004)
05. Kab. Kebumen	1184.88	33774	12808.4	821628.595	0.0155891	0.035082411	-0.352269386	(0.005)
06. Kab. Purworejo	710.39	33774	14562.4	821628.595	0.0177238	0.021033517	-0.074354279	(0.001)
07. Kab. Wonosobo	777.12	33774	14017.1	821628.595	0.0170601	0.023009286	-0.1299217	(0.002)
08. Kab. Magelang	1245.5	33774	14384.4	821628.595	0.0175072	0.036877272	-0.323541631	(0.006)
09. Kab. Boyolali	963.69	33774	17729.4	821628.595	0.0215784	0.028533327	-0.121333508	(0.003)
10. Kab. Klaten	1158.8	33774	18460.2	821628.595	0.0224679	0.034310223	-0.183861916	(0.004)
11. Kab. Sukoharjo	864.21	33774	23632.6	821628.595	0.0287631	0.025587882	0.050801243	0.001
12. Kab. Wonogiri	949.02	33774	16975.1	821628.595	0.0206603	0.028098971	-0.13355367	(0.003)
13. Kab. Karanganyar	856.2	33774	23603.1	821628.595	0.0287272	0.025350719	0.054303093	0.002
14. Kab. Sragen	879.03	33774	22946.8	821628.595	0.0279285	0.026026679	0.030628194	0.001
15. Kab. Grobogan	1351.43	33774	11139.1	821628.595	0.0135574	0.040013691	-0.470032658	(0.006)
16. Kab. Blora	852.11	33774	14349.3	821628.595	0.0174645	0.025229621	-0.159754866	(0.003)
17. Kab. Rembang	619.17	33774	16606.4	821628.595	0.0202116	0.018332638	0.042374958	0.001
18. Kab. Pati	1232.89	33774	18920.6	821628.595	0.0230282	0.03650391	-0.20007927	(0.005)
19. Kab. Kudus	831.3	33774	75307.4	821628.595	0.0916563	0.02461347	0.57098947	0.052
20. Kab. Jepara	1188.29	33774	13760.6	821628.595	0.016748	0.035183375	-0.322375811	(0.005)
21. Kab. Demak	1117.91	33774	12591.1	821628.595	0.0153245	0.033099535	-0.334434538	(0.005)
22. Kab. Semarang	1000.89	33774	27510.4	821628.595	0.0334828	0.02963476	0.05301983	0.002
23. Kab. Temanggung	745.83	33774	16073.1	821628.595	0.0195625	0.022082839	-0.052629667	(0.001)
24. Kab. Kendal	942.28	33774	24900.3	821628.595	0.030306	0.027899411	0.035933972	0.001
25. Kab. Batang	743.09	33774	15732.1	821628.595	0.0191474	0.022001712	-0.060346216	(0.001)
26. Kab. Pekalongan	873.99	33774	14447.7	821628.595	0.0175842	0.025877453	-0.16779873	(0.003)
27. Kab. Pemalang	1288.58	33774	10782.1	821628.595	0.0131228	0.038152802	-0.463499324	(0.006)
28. Kab. Tegal	1424.89	33774	13303.3	821628.595	0.0161914	0.042188725	-0.415912177	(0.007)
29. Kab. Brebes	1781.38	33774	14085.5	821628.595	0.0171434	0.052743826	-0.488073431	(0.008)
30. Kota Magelang	120.79	33774	41289.6	821628.595	0.0502534	0.0035764	1.147719583	0.058
31. Kota Surakarta	512.23	33774	52623.0	821628.595	0.0640471	0.015166315	0.625619618	0.040
32. Kota Salatiga	183.82	33774	39835.6	821628.595	0.0484837	0.005442618	0.94978802	0.046
33. Kota Semarang	1701.11	33774	60255.6	821628.595	0.0733368	0.050367159	0.163174338	0.012
34. Kota Pekalongan	296.4	33774	19417.3	821628.595	0.0236327	0.008775932	0.430219626	0.010
35. Kota Tegal	246.12	33774	34426.6	821628.595	0.0419004	0.007287221	0.759656694	0.032

Sumber: Data Olahan Excell